

Jurnal
Ilmu
Komunikasi

Vol.3 No. 2
Desember 2009

10 lembar B11
ISSN 1907-7413

SEMIOTIKA

B.11

Studi Budaya dan Komunikasi

PEREMPUAN DALAM BUDAYA KAPITALISME MEDIA
Sugeng Wahjudi

BERCERMIN PADA GENIE
Minat Multidisipliner Memahami Proses Belajar Kebudayaan
Desiana E. Pramesti

BAHASA SEBAGAI BUDAYA DAN REPRESENTASI KOMUNIKASI
Siti Meisyaroh

MULTIKULTURISME DAN MEDIA
Erman Anom

HEGEMONI BUDAYA KAPITALISME TELEVISI INDONESIA
Yoyoh Hereyah

TINJAUAN KRITIS POSISI MEDIA MASSA
DALAM KANCAH BUDAYA POLITIK NASIONAL
PADA PEMILU 2009
Fikri Reza

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS BUNDA MULIA



MULTIKULTURALISME DAN MEDIA

Oleh

Erman Anom, Ph.D⁴

Abstract

The study of "Multiculturalism" as a policy or cultural strategy on the cultural politics acknowledge into a fact, almost in all nations have diversity of traditions. A 'Life Wisdom' which are range from ethnic identity, religion indentity, until of citizens political identity. Multiculturalism has a political faces both in structure and policy, were citizens can live together within mutual respect for the diversity beginning of identity formation "nation" that unites on diversite (diversity) in a state of consensus "ika".

Keyword: Multiculturalism, Media, Identity, Social, Culture, and Politic

PENDAHULUAN

Kajian "Multikulturalisme" sebagai kebijakan atau strategi budaya yang dibahasakan pula dalam politik kebudayaan untuk mengakui fakta di hampir semua negara adanya kebhinekaan tradisi. Sebuah 'Life Wisdom' yang beragam mulai dari identitas etnik, identitas agama, sampai identitas politis warga negara. Multikulturalisme punya wajah politik, baik dalam struktur maupun kebijakannya, dimana warga negara dapat hidup bersama saling menghormati keragaman identitas awal sampai terbentuknya sebuah "bangsa" yang menyatukan keragaman (kebhinekaan) dalam konsensus kenegaraan yang "ika".

Multikulturalisme juga berwajah kultural, sebagai sikap mental yang dapat menghormati keragaman "sejarah-sejarah lokal" dibawah payung hukum nasional (*state law*) yang harus ditaati agar hidup bersama dalam keragaman dan kedamaian. Jika di Kanada Will Kylimicka memberi konteks multikultur dalam politik *vernakuler* tentang perbedaan bahasa dan etnik hidup dalam satu negara hukum. Di Indonesia, hal serupa terjadi dengan "bhineka tunggal ika"-nya, menghidupi selalu multikulturalisme, meski kerap jatuh bangun

⁴) Penulis adalah Dosen Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indo Esa Unggul

FAKTOR PENENTU MULTIKULTURALISME

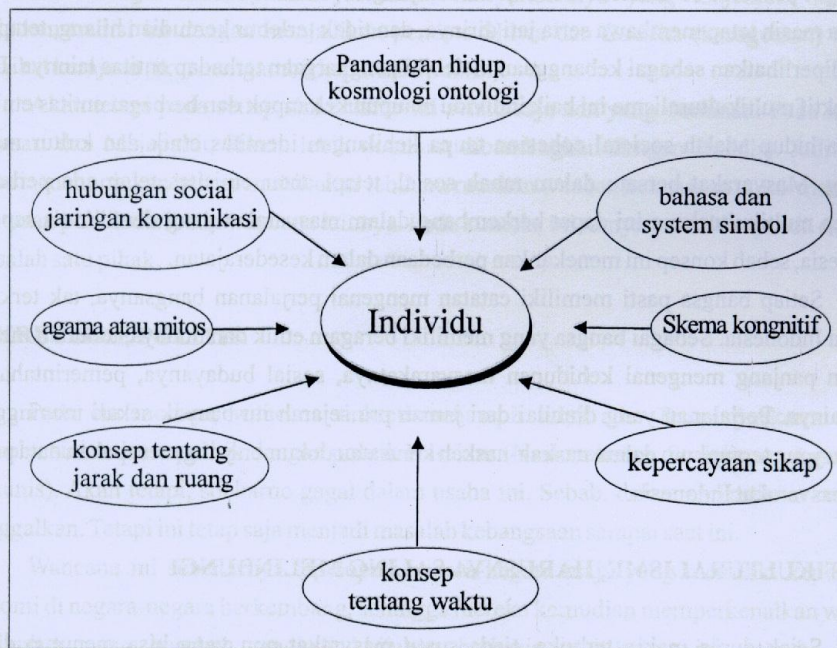
Dalam setiap multikultural selalu ada faktor sosial, budaya, politik dan faham keyakinan, atau kosmologi dan ontologi. Kehadiran faktor ini seolah-olah hanya bisa diterima namun tidak dapat dipahami atau dimengerti. Manakala seseorang dapat memahami sosial, budaya, politik, faham keyakinan, kosmologi dan ontologi suatu masyarakat, dia memprediksi perilaku dan motivasi tiap dimensi itu. Dalam studi multikultural harus berusaha menggambarkan dan menerangkan perbedaan-perbedaan faktor tersebut dalam kebudayaan masing-masing. Sebagai contoh dalam setiap struktur individu selalu terbentuk hierarki ontologi yang mengakui: (1) ada wujud tertinggi; (2) bersifat supernatural; (3) ada norma mengatur masalah kemanusiaan; (4) ada bentuk – bentuk rendah kehidupan; (5) ada objek-objek bukan manusia; dan (6) ada lingkungan alam. Persepsi manusia tentang relasi individu dengan unsur-unsur tersebut tersusun pada suatu hirarki berdasarkan atas kepentingan terhadap unsur itu, yakni *kepercayaan, sikap dan nilai*. Tiga unsur ini selalu dikenal dalam setiap uraian tentang ontologi-kebudayaan.

KOMPONEN KOMPONEN KESAMAAN MULTIKULTURISME

Kita sudah mengetahui bahwa semua manusia tergolong-golong kedalam kelompok-kelompok tertentu. pembentukan kelompok tersebut difaktori oleh kesamaan-kesamaan identitas di antara mereka. Kita mungkin bisa menamakan sekelompok orang di Kalimantan sebagai orang Punan karena mereka mempunyai kepercayaan yang sama terhadap kekuasaan arwah-arwah nenek moyang yang tinggal di *havun* atau langit. Atau mengelompokkan orang Taijo di Toribulu Sulawesi Tengah karena mereka sama-sama percaya kepada bintang-bintang, yaitu bintang *tamangkafu* yang terbit sebelah timur diwaktu malam, bintang *ikunya* yang terbit tepat diatas kepala ditengah malam, dan bintang *woonya* yang terbit di sebelah timur diwaktu senja.

Dalam multikulturisme ada faktor-faktor kesamaan yang menjadi landasan seseorang dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan kelompok lain secara damai yang sering disebut dengan komponen multikulturisme. Ada beberapa komponen yang paling penting; (1) Pandangan hidup, kosmologi dan ontologi; (2) bahasa dan simbol sistem; (3) skema kongnitif; (4) kepercayaan/sikap dan nilai; (5) konsep tentang waktu; (6) konsep tentang jarak dan ruang; (7) agama/mitos dan bentuk-bentuk ekspresi; dan (8) hubungan sosial dan jaringan komunikasi.

Gambar 1
Komponen-Komponen Kesamaan Multikulturisme



BAGAIMANA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA ?

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945, bahwa “Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia”. Dengan begitu keanekaragaman kebudayaan (*Multicultural Society*). Dan puncak-puncak kebudayaan itu hendaknya diartikan sebagai unsur-unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah.

Untuk menghindari bangkitnya gerakan-gerakan etnosentris yang bersifat primordial di Indonesia harus penekanan pada keanekaragaman kebudayaan dan tidak pada suku bangsa atau etnisitas, maka konsep yang paling cocok untuk itu adalah multikulturisme proposional yang penekanannya pada kesederajatan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Magdalia (2004), Multikulturalisme ini adalah sebuah perspektif alternatif untuk mengatasi pertentangan dan konflik sosial yang bernuansa etnis, agama dan berbagai identitas primordial lainnya.

Parsudi (2003), watak masyarakat multikultur adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat *peaceful-co-existence*, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih tetap membawa serta jati dirinya, dan tidak terlebur kemudian hilang, tetapi juga tidak diperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lainnya. Dalam perspektif multikulturalisme ini baik individu maupun kelompok dan berbagai entitas etnik dan budaya hidup adalah *societal cohesion* tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur masing-masing. Masyarakat bersatu dalam ranah sosial, tetapi antar etnisitas tetap ada perbedaan. Konsep multikulturalisme ini dapat berkembang dalam masyarakat yang demokratis seperti di Indonesia, sebab konsep ini menekankan perbedaan dalam kesederajatan.

Setiap bangsa pasti memiliki catatan mengenai perjalanan bangsanya, tak terkecuali bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki beragam etnik dan budaya, tentulah memiliki catatan panjang mengenai kehidupan masyarakatnya, sosial budayanya, pemerintahan dan sebagainya. Perjalanan yang dimulai dari jaman pra sejarah itu banyak sekali meninggalkan catatan yang terangkum dalam naskah-naskah kuno atau dokumen yang merupakan data penting bagi masyarakat Indonesia.

MULTIKULTURALISME, HARUSNYA SALING MELINDUNGI

Sejak dunia makin terbuka, tiada suatu masyarakat pun yang bisa menutup dirinya. Pergaulan dengan masyarakat lainnya sudah menjadi keharusan, sehingga setiap masyarakat mesti memiliki pemahaman terhadap masyarakat lainnya. Semua itu disebut dengan multikulturalisme pada wacana kekinianya. Wacana ini terus mendapatkan perhatian diberbagai kalangan, terutama dalam membuat keputusan publik, sehingga keputusan ini bisa diterima berbagi kalangan. Jadi, dalam konteks ini, wacana multikultur lebih merupakan wacana kekuasaan (pengambil keputusan publik) daripada wacana lainnya. Karena itu, banyak yang curiga terhadap wacana ini sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik sosial.

Apalagi, sejarah manusia menunjukkan bahwa wacana multikultur adalah wacana kekuasaan. Wacana ini sebenarnya telah ada jauh sebelum masehi. Raja asoka di india tengah yang berkuasa pada sekitar 200 SM melakukan sinkretisme Hindu dan Buddha untuk memecahkan masalah multikultur dalam masyarakatnya. Walaupun kemudian agama buddha menjadi dominan ketika itu. Dinasti Saka yang berkuasa di India pada 78 Masehi juga melakukan sinkretisme agama untuk memecahkan masalah multikultur dalam wilayah kekuasaannya, sehingga tidak ada lagi pertentangan terhadap masyarakatnya. Tetapi ketika itu, Hindu menjadi lebih dominan dibandingkan lainnya.

Kebijakan – kebijakan politik ini ditiru penguasa Nusantara berabad-abad kemudian. Raja Kertanegara yang berkuasa di Jawa sekitar abad ke-13 Masehi menyebut dirinya Batara Shiwa-Buddha agar mendapatkan justifikasi masyarakatnya yang majemuk. Majapahit melanjutkan tradisi ini dengan menjadikan pendeta Shiwa dan Buddha (kasagotaan) menjadi penasihat kerajaan (ikut mengambil keputusan publik).

Akan tetapi pada setiap sinkretisme ini selalu saja ada yang dominan. Pada kerajaan Singasari dan Majapahit, Hindu lebih dominan dibandingkan dengan Buddha. Jadi sejarah manusia menunjukkan bahwa multikultur lebih meruokan wacana kekuasaan untuk mengambil keputusan publik daripada wacana lainnya. Pada konteks ini ternyata selalu saja ada dominasi dari salah satu pihak.

SINKRETISME POLITIK

Pada era modern, wacana sinkretismehampir tidak ada. Tetapi Soekarno sempat mencoba sinkretisme politik dengan politik Nasakom(Nasionalisme, Sosialisme, Agama, dan Komunis). Akan tetapi, soekarno gagal dalam usaha ini. Sebab, dalam sinkretisme kemudian ditinggalkan. Tetapi ini tetap saja menjadi masalah kebangsaan sampai saat ini.

Wacana ini sebenarnya dipelopori negara-negara maju yang memiliki kepentingan ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga mereka kemudian memperkenalkan wacana multikultur yang berubah menjadi kebijakan berbasis multikultur ini, mereka seolah-olahberapresiasi terhadap penduduk lokal. Tetapi pada saat yang sama, mereka menuntut apresiasi yang sama dari penduduk lokal.

Wacana ini sebenarnya dipelopori negara-negara maju yang memiliki kepentingan ekonomi di negara-negara berkembang. Keberadaan mereka seringkali sulit dipahami di berbagai negara berkembang, sehingga mereka kemudiaan mereka memperkenalkan wacana multikultur untuk bisa mendapatkan apresiasi dari penduduk lokal. Dalam wacana multikultur yang berubah menjadi kebijakan berbaris multikultur ini, mereka seolah-olah berapreasiasi terhadap penduduk lokal. Tetapi pada saat yang sama, mereka menuntut Apresiasi yang sama dari penduduk lokal.

Pada interaksi seperti ini, kepentingan negara-negara mau ternyata menjadi lebih dominan. Sedangkan kepentingan kebudayaan lokal lebih merupakan aksesoris, hanya untuk kepentingan pariwisata. Jadi multikultur, pada konteks ini lebih merupakan sinkretisme baru untuk kepentingan kekuasaan ekonomi daripada niat baik untuk membangun masyarakat dunia untuk maju secara bersama-sama. Apalagi pandangan dunia kapitalistis lebih mewarnai

wacana ini daripada yang lainnya. Dalam pandangan ini jelas kepentingan ekonomi adalah segala-galanya, sedangkan kebudayaan adalah masalah berikutnya sepanjang berhubungan dengan ekonomi.

Multikultur dalam perspektif seperti ini kemudian memang mendapatkan banyak penolakan. Sebab, wacana multikultur ini lebih merupakan wacana untuk kepentingan kekuasaan ekonomi daripada wacana yang muncul dari kesadaran publik. Wacana seperti itu ternyata tidak dalam rangka dalam menguatkan masyarakat, tetapi untuk menguatkan kekuasaan. Sehingga seringkali ini memunculkan perpecahan di masyarakat, seperti pada era Nasakom, yang menimbulkan pertumpahan darah di negeri ini.

Oleh karena itu, multikulturisme mestilah lebih merupakan pembangunan kesadaran publik. Kesadaran publik tersebut akan terbangun bila publik memang merasakan bahwa itu merupakan kebutuhannya.

KASUS DAN FORMAT DI BALI

Perkembangan masyarakat Bali bisa menjadi contoh format multikultur yang berjalan secara alamiah. Masyarakat Bali, pada awalnya terdiri atas berbagai ras. Pertama-pertama ada ras orang-orang Aga yang masuk bersamaan dengan kedatangan Rsi Markendya ke Bali sekitar abad ke-7 Masehi. Udayana Warmadewa kemudian membawa ras Jawa sekitar abad ke-9 Masehi. Jayapangus sekitar abad ke-12 Masehi membawa ras Cina melalui pernikahannya dengan putri Cina. Ras Jawa kemudian masuk lagi ke Bali sekitar abad ke-14 Masehi melalui ekspedisi Majapahit ke Bali.

Semua kultur yang terbawa masuk ke Bali oleh ras-ras itu mendapatkan tempat pada masyarakat Bali. Sebab mereka ternyata kemudian berada dalam kondisi saling memerlakukan dalam berbagai hal. Mereka kemudian membangun identitas baru sebagai masyarakat Bali mirip Cina, India dan Jawa. Seluruh kebudayaan lebur dalam satu identitas kebudayaan, yaitu kebudayaan Bali.

Pada saat ini, wacana multikultur juga tampaknya hendak menuju pada masyarakat dunia yang satu identitas kebudayaan, yaitu kebudayaan dunia. Wacana ini bisa saja terwujud sepanjang menjadi kebutuhan masyarakat dunia. dalam konteks Bali, satu identitas menjadi kebutuhan sebab mereka berhadapan dengan dunia luar yang memiliki identitas sendiri-sendiri. Dalam konteks dunia, apakah itu merupakan kebutuhan masyarakat dunia? Jika bukan meruoakan kebutuhan masyarakat dunia maka multikultur akan lebih merupakan kebutuhan kekuasaanekonomi dunia. Bila ini merupakan kebutuhan kekuasaan maka dominasi tidak bisa

dihilangkan. Sebab kekuasaan selalau saja berkuat pada persoalan dominasi, bahkan tirani. Pada konteks inilah wacana multikultur mendapatkan perlawanan.

Wacana ini mestilah terarah dalam usaha untuk pembangunan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Apabila keanekaragaman menjadi kenyataannya sehari-hari masyarakat mestilah berada dalam kesadaran itu. Sehingga mereka tidak berada dalam kondisi memaksakan kehendak dan sejenisnya. Persoalan ini seharusnya sudah selesai di Indonesia.

Bahkan Indonesia seharusnya sudah memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah itu. Sehingga konflik sosial seharusnya sudah tidak berubah lagi menjadi kekerasan tetapi sudah berubah menjadi persaingan yang sehat. Keinginan dominasi walaupun itu masih ada dalam bataskemanusiaan seharusnya telah berubah menjadi keinginan untuk saling melindungi. Sehingga Indonesia seharusnya sudah menjadi masyarakat yang paling multikultur di dunia. Yang terjadi justru sebaliknya karena pembangunan multikultur di Indonesia lebih merupakan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat.

HAKEKAT MULTIKULTURALISME DAN MEDIA

Manusia secara hakikinya baik, hanya kekuatan sosiallah yang bertanggungjawab terhadap pelbagai kecurangan yang terjadi. Ukuran-ukuran budaya tidak dilihat sebagai masalah tetapi fenomena dari kondisi-kondisi sosial. Bila kondisi-kondisi sosial yang mendukung pranata ekonomi dan politik yang benar diciptakan maka ukuran-ukuran budaya yang diinginkan akan segera lahir. Multikulturalisme terjadi karena pranata ekonomi dan politik tidak benar tercipta dalam masyarakat sehingga media memainkan perannya dalam mewujudkan pranata ekonomi dan politik berjalan terciptakan benar. Sekarang menjadi pertanyaan bagaimana hubungan multikulturalisme dan media disini? Media tidak selalu menjadi sebab atau faktor pembentuk budaya, media hanya bertindak sebagai saluran penyampaian isi budaya untuk mengisi sel-sel struktur sosial yang telah memiliki karakteristik tertentu, bahwa pendekatan media terhadap multikulturalisme ditentukan oleh tujuan dan sasaran, sedangkan isi yang lazimnya yang diproduksi dan disebarluaskan oleh media disebut sebagai budaya massa, disamping itu juga media memperkokoh hadirnya budaya tinggi dan budaya rakyat. Media cenderung juga menjajah baik budaya tinggi dan budaya rakyat dalam segi isi dan bentuk.

KESIMPULAN

Indonesia seharusnya sudah memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah multikulturisme secara alami. Sehingga konflik sosial seharusnya sudah tidak berubah lagi menjadi kekerasan tetapi sudah berubah menjadi persaingan yang sehat. Keinginan dominasi walaupun itu masih ada dalam batas kemanusiaan seharusnya telah berubah menjadi keinginan untuk saling melindungi. Sehingga Indonesia seharusnya sudah menjadi masyarakat yang paling multikultur di dunia. Yang terjadi justru sebaliknya karena pembangunan multikultur di Indonesia lebih merupakan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, multikulturisme mestilah lebih merupakan pembangunan kesadaran publik. Kesadaran publik tersebut akan terbangun bila publik memang merasakan bahwa itu merupakan kebutuhannya. Multikulturisme dibangun dengan landasan dari sudut kepentingan masyarakat, dan bukan dibangun dari sudut kepentingan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana Deddy, Rakhmat Jalaluddin. 2005. *Komunikasi Antarbudaya*.: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyana Deddy. 2004. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*., Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- John Hartley. 2002. *Communication Cultural and Media Studies*., Routledge, London
- Parekh, Bikhu. 2001. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity And Political Theory*. Cambridge Mass: Harvard University Press
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung